



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA  
NOMOR 03 TAHUN 2022  
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PERBEKEL, PERANGKAT DESA, DAN BPD DESA SIDAKARYA  
KANTOR PERBEKEL DESA SIDAKARYA  
DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN , KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Perbekel, Perangkat Desa serta BPD secara berdayaguna dan berhasil, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat Desa Sidakarya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Tambahan Penghasilan Perbekel, Perangkat Desa Dan BPD Desa Sidakarya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
  2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611 )
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa;
12. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang daftar kewenangan Berdasarkan hak asal – usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa ;
14. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/329/HK/2021 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa;

15. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/330/HK/2021 tentang Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa;
16. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berdasarkan Lokal Berskala Desa.
17. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2022.
18. Peraturan Perbekel Desa Sidakarya Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Perbekel, Perangkat Desa, Staf Desa Serta Tambahan Tunjangan Jabatan BPD Desa Sidakarya Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan kepada Perbekel, Perangkat Desa, dan BPD Desa Sidakarya :
1. Perbekel Sebesar Rp. 1.540.000 setiap bulannya serta dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Sekretaris Desa Sebesar Rp. 1.208.000 setiap bulannya serta dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku..
  3. Kasi Pemerintahan Sebesar Rp. 1.164.000 setiap bulannya serta dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Kasi Pelayanan Sebesar Rp. 1.164.000 setiap bulannya serta dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  5. Kaur Umum Sebesar Rp. 1.064.000 setiap bulannya serta dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  6. Kaur Keuangan Sebesar Rp. 964.000 setiap bulannya serta dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  7. Kasi Kesra Sebesar Rp. 864.000 setiap bulannya serta dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  8. Kaur Perencanaan Sebesar Rp. 864.000 setiap bulannya serta dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  9. Pelaksana Kewilayahan Sebesar Rp. 764.000 per orang setiap bulannya serta dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  10. Ketua BPD Sebesar Rp. 600.000 setiap bulannya serta dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  11. Wakil Ketua BPD Sebesar Rp. 500.000 setiap bulannya serta dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. Sekretaris BPD Sebesar Rp. 450.000 setiap bulannya serta dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13. Anggota BPD Sebesar Rp. 400.000 setiap bulannya serta dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 03 Januari 2022

PERBEKEL DESA SIDAKARYA  
  
I WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.